

## INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BANTAENG

<sup>1)</sup>Herman Dema, <sup>2)</sup>Nandang Alamsah D., <sup>3)</sup>Rahman Mulyaman, <sup>4)</sup>Mudiyati Rahmatunnisa

<sup>1)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

<sup>2) 3) 4)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung

[hermandema1010@gmail.com](mailto:hermandema1010@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tata Kelola pemerintahan yang inovatif yang merupakan pengkajian dari percepatan dan perbaikan tata Kelola pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan unit analisis pemerintahan daerah Kabupaten Bantaeng. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive, pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dokumentasi, webinar, dan data online. Analisis data mencakup beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, setelah data terseleksi dianalisis dengan menggunakan Nvivo 12 plus, dan selanjutnya penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang menentukan keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah adalah (1) pemimpin & kepemimpinan, (2) kelembagaan, (3) modernisasi sektor publik, (4) masyarakat sipil yang terorganisir, (5) tradisi atau budaya demokrasi, (6) tingkat kepercayaan publik, dan (7) faktor komunikasi, koordinasi, dan sinergitas. Membangun tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif dibutuhkan beberapa strategi yaitu pelibatan warga masyarakat, pemanfaatan kerjasama, layanan terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan desentralisasi. Untuk mempercepat inovasi tata kelola pemerintahan disarankan untuk menerapkan model kolaboratif antara lembaga/instansi serta menentukan tema dalam setiap program dan kegiatan.

Kata Kunci: Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan

### Abstract

*This study discusses innovative governance which is an assessment of the acceleration and improvement of governance. The method used in this study is a qualitative method with a unit of analysis for the regional government of Bantaeng Regency. The technique of determining the informants is done by purposive, data collection with in-depth interview techniques, observations, documentation, webinars, and online data. Data analysis includes several stages, namely data reduction, data presentation, after the selected data is analyzed using Nvivo 12 plus, and then conclusions are drawn. The results showed that the factors that determine the success of local governance are (1) leaders & leadership, (2) institutions, (3) modernization of the public sector, (4) organized civil society, (5) democratic traditions or culture, (6) the level of public trust, and (7) factors of communication, coordination, and synergy. Building innovative local governance requires several strategies, namely community involvement, utilization of cooperation, integrated services, utilization of information technology, and decentralization. To accelerate governance innovation, it is recommended to apply a collaborative model between institutions/agencies and determine the theme in each program and activity.*

Keywords : Innovation and Governance

## A. PENDAHULUAN

Setelah menjadi isu dan perdebatan, konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) menjadi fokus pengkajian, yang menghasilkan beragam definisi. Tata kelola pemerintahan merupakan konsep yang sudah cukup lama diperkenalkan, dan merupakan kata yang memiliki banyak arti dan interpretasi di kalangan akademisi dan praktisi. Menurut Dwiyanto, et al (Koenti, 2016:31), Tata pemerintahan yang baik merujuk pada cara kekuasaan dan kewenangan itu digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti ketentuan, prinsip, dan nilai yang selama ini dianggap baik oleh masyarakat. Dwiyanto dalam Syakrani (2009) mengemukakan, konsep *governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga “didengar” (*Governance refers to the institutions, processes & traditions which define how powers is exercised, how decisions are made, and how citizens have their say*). Syakrani (2009), definisi standar konsep *governance* merujuk pada Bank Dunia yang mengemukakan, *governance as the manner in which power is exercised in management of country's economic and social resources for development*, atau pada rumusan UNDP: *governance is defined as the exercise of political, economic & administrative authority to manage a nation's affairs*. Konsep *governance* juga diperkuat oleh Suwaryo (2017:219) bahwa *governance* mengandung makna bagaimana cara pemimpin suatu bangsa dalam mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat yang di dalamnya mengandung unsur demokrasi. Senada dengan itu menurut Sanusi dan Putra (2019:1) bahwa untuk memahami konsep *governance* (governance) tidak terlalu sulit, karena wujud keberadaannya sejak lama sudah ada di tengah-tengah masyarakat yaitu sebuah proses yang sedang terjadi terutama ketika negara melakukan pengaturan kepada masyarakat atau warga negaranya.

Memahami beberapa konsep *governance* yang dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *governance* atau tata kelola pemerintahan adalah suatu sistem atau mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor lainnya dalam mendistribusikan kekuasaan serta

pengambilan keputusan dalam mengelola sumberdaya melalui kebijakan-kebijakan yang di dalamnya mengandung unsur demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Putra (2020:149) bahwa *governance* atau tata Kelola pemerintahan merupakan mekanisme atau system pengelolaan urusan negara yang dilakukan oleh aktor-aktor termasuk pemerintah maupun non-pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki dengan saling berinteraksi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Good *governance* bukan hanya melibatkan sektor publik tetapi sektor swasta dan masyarakat madani juga harus terlibat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Menurut Kasim (2015:14) good *governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, responsive, consensus oriented, equity and inclusiveness, efektivitas dan efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Banyak pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelebagaan good *governance*. Ganie-Rochman dalam Syakrani (2009), mengembangkan empat prinsip, yakni akuntabilitas, rule of law, informasi, dan transparansi. Prinsip yang hampir sama juga dikemukakan oleh Bhatta (1997), yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law. Versi lain untuk mengukur tingkat keberhasilan pelebagaan konsep good *governance* adalah dengan mengidentifikasi isu-isu menonjol di sekitar tatanan baru. Kaufmann dkk (1999) mengemukakan lima isu penting, yaitu:

1. *Voice and accountability*, yakni masyarakat memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam menentukan pemerintahan mereka. Memiliki hak kebebasan seperti berorganisasi, berbicara, dan berekspresi.
2. *Political stability*, yakni stabilitas politik menjadi hal pokok dalam mengelola pemerintahan. Dalam proses pengelolaan dan pergantian pemerintahan harus dilakukan dengan aturan secara konstitusi.
3. *Government effectiveness*, yang meliputi kualitas pelayanan publik, kemandirian dan

kualitas pegawai tanpa ada tekanan-tekanan politik, kredibilitas pemerintah terhadap komitmen-komitmen kebijakan publik.

4. *Regulatory quality*, merupakan kemampuan pemerintah untuk memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dan memberikan ruang serta mempromosikan pembangunan sektor privat (swasta).
5. *Control of corruption*, yakni bagaimana sumberdaya publik diarahkan dalam pengendalian penyelewengan kepentingan pribadi dan kepentingan elit tertentu.

Selain lima isu penting yang dikemukakan oleh Kaufmann dkk, terdapat konsep yang dikemukakan oleh Huther dan Shah dalam Syakrani (2009) mengembangkan konsep component governance quality index, yang mencakup (a) indeks partisipasi warga negara, (b) indeks orientasi pemerintah, (c) indeks pembangunan sosial, dan (d) indeks manajemen ekonomi. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut maka dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*), harus terlibat tiga aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu negara, swasta, dan masyarakat. Jadi negara bukan lagi aktor tunggal, sehingga diperlukan redefinisi peran negara dan aktor-aktor lainnya. *Governance* terjadi ketika aktor-aktor tersebut saling berinteraksi, sebagai sebuah kekuatan penyeimbang satu sama lain. Aktor yang dimaksud adalah:

1. Negara (*the state*)
  - a. Mewujudkan lingkungan politik yang kondusif dengan meredefinisikan peran pemerintah dalam mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan melindungi kelompok yang lemah.
  - b. Menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik.
  - c. Menyediakan infrastruktur, iklim demokrasi, memperkuat kapasitas pemerintah lokal, maupun nasional.
2. Sektor swasta (*the private sector*)
  - a. Sektor swasta memainkan peranan penting melalui pendekatan pasar (*market approach*).
  - b. Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi di mana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan

dukungan dari lingkungan yang mapan dalam bingkai incentives and rewards.

3. Masyarakat (*civil society*)
  - a. Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam menjamin interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.
  - b. Masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperkuat kedua unsur utama yang lain.
  - c. Masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasinya dalam aktivitas sosial dan ekonomi, dan mengorganisir mereka ke dalam satu kelompok yang potensial mempengaruhi kebijakan publik.

Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau "eksploitasi" oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Dengan demikian, negara bukan lagi aktor tunggal, sehingga diperlukan redefinisi peran negara, dan aktor-aktor lainnya. *Governance* terjadi ketika aktor-aktor tersebut saling berinteraksi, sebagai kekuatan penyeimbang satu sama lain. Lebih lanjut, Tahir (2014:104), menegaskan bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik setidaknya memiliki lima sasaran yaitu:

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat paling atas.
2. Tercipta system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, dan profesional, transparan dan akuntabel.
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah

Upaya untuk mencapai lima sasaran tata kelola pemerintahan pemerintahan yang baik dapat tercapai jika terjadi keseimbangan peran ketiga pilar atau actor dalam governance yaitu pemerintah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat. Actor pemerintah terdiri dari eksekutif, legislative, dan yudikatif yang merupakan actor yang memainkan peran dalam menjalankan lingkungan politik dan hukum yang kodusif bagi actor-aktor lain dalam governance. Actor dunia usaha/swasta memainkan perannya dalam penciptaan lapangan kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Actor masyarakat memainkan peran dalam menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Ketiga aktor tersebut, pemerintah merupakan pemegang kendali dari aturan main sehingga ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata Kelola pemerintahan yang baik.

Inovasi dalam partisipasi dan governance adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, metode baru, maupun pendekatan yang baru untuk mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memperbaiki peningkatan kinerja. Terutama dalam hal inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovatif dan good practice dalam sektor publik sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Konsep inovatif secara umum dianggap merepresentasikan sebuah langkah perubahan bagi organisasi atau pelayanan publik. Oleh karena itu inovasi diidentikkan dengan sesuatu yang baru yang menunjukkan kinerja lebih baik dari pada pola-pola lama (Lynn, 1997; Zegans, 1997; Alburry, 2003). Sementara konsep good practice secara sederhana dimaknai sebagai penerapan gagasan yang berhasil membawa dampak bagi perbaikan penyelenggaraan organisasi atau pelayanan publik serta dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian perbedaan utama dari konsep inovasi dan good practice terletak pada variabel kebaruan, namun demikian dalam dokumen ini kedua konsep tersebut digunakan secara berdampingan.

Dari berbagai macam definisi terkait dengan inovasi juga dikemukakan oleh

Freeman dalam Saparita (2015:17), sistem inovasi didefinisikan sebagai jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai, mengimpor (mendatangkan), memodifikasi, dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. Definisi Freeman menunjukkan pada komponen penting sistem inovasi, yaitu kelembagaan. Sedangkan Sistem Inovasi Nasional (SIN) pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/2010 didefinisikan sebagai suatu jaringan rantai antara institusi publik, lembaga riset dan teknologi, universitas serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi-inovasi diberbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat. Menurut Domai (2011: 24), bahwa tanpa inovasi kebijakan dan administratif, governance masuk ke kondisi yang busuk dan tidak efektif, kehilangan kapasitas pemerintahannya, dan menjadi target kritikisme dan kegagalan. Selanjutnya inovasi kebijakan dalam governance dianggap penting bagi adaptasi dan penyesuaian lingkungan yang berubah cepat dalam dunia yang sedang mengalami globalisasi (Domai; 2011: 24-25). Inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk membangun peningkatan kapasitas pemerintahan dalam dunia yang mengalami perubahan yang begitu cepat dan kadang tak menentu. Kegagalan menciptakan inovasi hari berarti awal kegagalan untuk berubah menuju suatu kemajuan di masa yang akan datang.

Pemerintahan yang punya tekad untuk suatu kemajuan di masa yang akan datang, harus mampu menciptakan inovasi dalam berbagai hal seperti inovasi di bidang organisasi, kebijakan, institusi, budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan atau adaptasi dengan perubahan dan lingkungan. Menurut Handayani (2013:98), bahwa langka yang seharusnya dilakukan pada penataan pilar-pilar Sistem Inovasi Daerah adalah reformasi kebijakan inovasi dengan menghapus segala kebijakan yang menghambat atau berbelit-belit. Kebijakan yang menghambat kemajuan seharusnya dievaluasi dan dikaji ulang untuk mempercepat pelaksanaan proses inovasi

dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah.

Dipertegas lagi oleh Sumarto (2009:14) bahwa inovasi adalah upaya untuk memperkenalkan sesuatu yang baru: ide baru, metode baru, maupun pendekatan baru, serta upaya untuk mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja governance. Selanjutnya menurut Yogi Suwarno dalam Tahir (2016: 283) bahwa: "Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak ada satu kesepahaman definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi."

Atribut yang dimaksud oleh Yogi Suwarno sebagaimana yang dikemukakan oleh Tahir adalah sebagai berikut:

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif. Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.
2. *Compatibility* atau Kesesuaian. Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.
3. *Complexity* atau Kerumitan. Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
4. *Triability* atau Kemungkinan dicoba. Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan

atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. *Observability* atau Kemudahan diamati. Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Pelaksanaan sebuah inovasi dalam tata kelola pemerintahan memerlukan instrumen dan strategi dalam pencapaiannya. Strategi inovasi dalam pemerintahan menurut Sangkala dalam Tahir (2016 : 284) adalah:

1. Layanan terintegrasi, dimana sektor publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana dimana warga meminta layanan yang disediakan disertai dengan kenyamanan.
2. Desentralisasi pemberian dan monitoring layanan lebih dekat dengan masyarakat dan biasanya membentuk kepastian terhadap tingkat permintaan yang tinggi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atau pelaku bisnis.
3. Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif untuk memenuhi peningkatan pemenuhan agar lebih efisien dalam pemberian layanan publik, lebih kolaboratif antar organisasi dan juga terjadi kerjasama antara publik dan swasta.
4. Pelibatan warga negara, kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong peran warga untuk berpartisipasi dalam mendorong perubahan.
5. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Pemanfaatan teknologi dalam informasi dan komunikasi mendorong tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.

Pemanfaatan teknologi dan pelibatan warga dalam tata kelola pemerintahan yang inovatif merupakan suatu keharusan, sehingga warga masyarakat merasa dilibatkan, diberdayakan, dan termotivasi untuk berkontribusi. Menurut Diego Reforgiato Recupero (2017) seperti yang disampaikan berikut tentang bagaimana pelibatan warga dalam Smart Government:

*"Citizens are the heart of a city and keys in several challenges cities face through on-going urbanization and demographic growth, consumption habits and increasing expectations. Therefore, they have to be at the*



*heart of the solution. Citizens have always been insufficiently engaged, motivated and empowered to contribute. Besides, cities have not had deep knowledge of their citizens to actively engage them. With a better understanding of their motivations, cities can define effective strategies and tools to push citizens to be actors in smart city systems. The goals should be to stimulate, inform, and educate citizens so that they can act responsibly and proactively. When smartly mobilized, the effect of citizens' behaviour, choices, creativity and entrepreneurship might be enormous and have a deep impact. Therefore, by increasing innovation capabilities of the social system and by injecting advanced information technologies into it, cities become more open, innovative, efficient and manageable".*

Pemanfaatan teknologi dan pelibatan warga negara, tujuannya harus merangsang, menginformasikan, dan mendidik warga sehingga mereka dapat bertindak secara bertanggung jawab dan proaktif. Meningkatkan kemampuan inovasi melalui teknologi informasi yang canggih ke dalamnya, kota menjadi lebih terbuka, inovatif, efisien dan mudah dikelola. Selanjutnya faktor kunci dalam tata kelola yang inovatif ini sesuai yang dikemukakan oleh Diego Reforgiato Recupero yaitu: Two factors play a key role in this scenario:

(i) *ICT, particularly as Internet becomes pervasive (not only through smart phones);*

(ii) *the willingness to be open towards new citizen-driven initiatives that might not fit with the current administrative system.*

Information and Communications Technology (ICT) dan keterbukaan terhadap inisiatif warga untuk turut serta dalam tata kelola pemerintahan yang inovatif sudah merupakan tuntutan sistem administrasi saat sekarang ini.

## B. METODE PENELITIAN

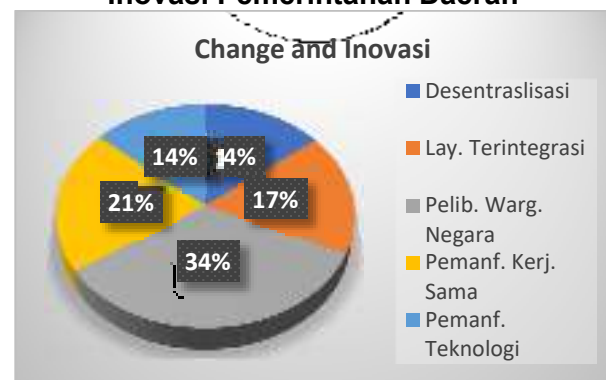
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Setiap indikator diukur melalui hasil coding data wawancara dan coding data media online dengan menggunakan Nvivo 12 plus untuk menghasilkan tampilan nilai persentase setiap indikator yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian, hasil penelitian dapat dilengkapi hasil olahan data, sedangkan bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, mengintepresikan penemuan secara logis, dengan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Pemerintahan daerah yang inovatif merupakan dambaan seluruh warga masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Tata Kelola pemerintahan inovatif akan bisa terlaksana jika didukung oleh kemampuan para pengelola untuk melaksanakan strategi dalam menciptakan inovasi-inovasi yang baru.

Pemerintahan daerah inovatif adalah kemampuan atau keberhasilan pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dalam tata Kelola pemerintahan, pelayanan public dan berbagai bentuk inovasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah. Pemerintahan daerah yang inovatif dapat memberi manfaat kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Kemanfaatan itu seperti menambah Pendapata Asli Daerah (PAD), meningkatkan capaian kinerja pemerintah, menghemat belanja daerah (mengurangi pemborosan), dan dapat meningkatkan pelayanan publik. Pemerintahan daerah yang inovatif tidak dapat diraih hanya sekedar berteori saja, tetapi harus didukung oleh tindakan nyata oleh seorang pemimpin. Beberapa strategi yang dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif sebagaimana yang digambarkan pada grafik berikut:

**Grafik**  
**Strategi Membangun Perubahan dan Inovasi Pemerintahan Daerah**



Sumber: Analisis Nvivo 12 plus, 2020

Grafik tersebut memberikan gambaran penjelasan tentang strategi membangun perubahan dan inovasi pemerintahan daerah. Strategi membangun perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah

Kabupaten Bantaeng periode 2008-2018 dilihat dari beberapa indikator. Adapun indikator yang diukur adalah desentralisasi, layanan terintegrasi, pelibatan warga masyarakat, pemanfaatan kerja sama, dan pemanfaatan teknologi informasi. Setiap indikator diukur melalui hasil coding data wawancara dan coding data media online dengan menggunakan Nvivo 12 plus untuk menghasilkan tampilan nilai persentase setiap indikator. Tampilan grafik dan nilai persentase data wawancara dan data media online selanjutnya dinarasikan berdasarkan nilai persentase tertinggi setiap dari setiap indikator strategi dalam membangun perubahan dan inovasi pemerintahan daerah.

### 1. Pelibatan Warga Masyarakat.

Pelibatan masyarakat menunjukkan bahwa warga masyarakat atau publik dalam tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan angka (34%). Pelibatan warga masyarakat merupakan indikator paling dominan dalam membangun perubahan dan inovasi tata kelola pemerintahan yang inovatif di Kabupaten Bantaeng. Masyarakat sangat merindukan sosok pemimpin yang dapat menyapa mereka, dapat melibatkan mereka dalam pembangunan, hadirnya gazebo di rumah Bupati yang dibuka setiap Selasa dan Kamis sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapatnya. Kehadiran Bupati Nurdin Abdullah yang sering berbincang dengan pedagang kaki-5, berdialog dengan nelayan, petani, pengayuh becak hingga duduk lesehan bersama warga menikmati kuliner di pesisir pantai kota, merupakan hal yang positif untuk menarik partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam tata kelola pemerintahan yang baik sangat perlu melibatkan warga masyarakat termasuk sektor swasta. Menurut Sedarmayanti dan A. Aziz (2020:3) bahwa dengan diterapkannya konsep good governance yang menekankan tentang pentingnya kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Pendapat lain tentang pelibatan warga negara menyatakan bahwa, dalam layanan public baru focus utama implementasi adalah pelibatan warga negara dalam pembangunan. Karena keterlibatan warga negara justru dilihat sebagai bagian dari implementasi kebijakan yang tepat dan diperlukan dalam sebuah proses demokrasi (Denhardt dan Denhardt, 2013:170). Sejalan dengan itu, Cooper dalam

Denhardt dan Denhardt (2013:170) menyatakan bahwa, "Administrator publik harus bertanggung jawab secara etis untuk mendorong partisipasi seluruh penduduk dalam proses perencanaan dan penyediaan barang dan jasa public. Partisipasi mungkin ya mungkin tidak bermanfaat atau tidak memuaskan bagi administrator, tetapi ia penting bagi penciptaan dan pemeliharaan sebuah komunitas politik yang mengatur dirinya sendiri"

Ini jelas bahwa menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin dan mendorong keikutsertaan warga masyarakat untuk terlibat dalam semua proses tahapan formulasi kebijakan maupun proses implementasi kebijakan. Keterlibatan warga negara dalam tata pemerintahan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan-tuntutannya, tetapi kehadirannya dalam ruang public diharapkan dapat mempertemukan perspektif yang berbeda dengan pemerintah untuk dikelola secara bersama sebagai suatu solusi dalam tata kelola pemerintahan.

### 2. Pemanfaatan Kerjasama

Indikator pemanfaatan kerjasama merupakan indikator dalam mendorong kerjasama antara masyarakat dengan swasta untuk berkolaborasi. Strategi pemanfaatan kerjasama merupakan indikator yang kedua dengan nilai (21%) dalam menciptakan pemerintahan inovatif di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil analisis melalui Nvivo 12 plus menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong kolaborasi antara masyarakat dengan swasta dalam membangun perubahan dan inovasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Hal ini didukung oleh keberhasilan meningkatkan pelayanan terhadap ibu melahirkan yang dulunya tingkat kematian tinggi karena kekurangan darah, akhirnya tidak ada lagi yang meninggal karena kekurangan darah. Dengan kolaborasi tiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berhasil menciptakan inovasi yang diberi nama Terminal Darah Puskesmas".

Inovasi "Terminal Darah Puskesmas" sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bantaeng yaitu "Terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir batin berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian dan keunggulan berbasis agama dan budaya lokal". "Terminal Darah Puskesmas" mendukung misi ketiga yaitu "meningkatkan pemerataan dan kualitas

pelayanan sosial dasar lainnya. Adapun tujuan inovasi “Terminal Darah Puskesmas” adalah:

- a. Untuk menjamin dan memastikan ketersediaan darah bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan nifas saat ada yang membutuhkan.
- b. Meningkatkan persalinan tenaga Kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
- c. Terbentuknya forum pendonor darah tetap sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di setiap puskesmas.
- d. Ketersediaan darah bukan hanya diperuntukkan bagi ibu hamil, melahirkan, dan nifas, tetapi dapat diperuntukkan kasua Kesehatan lainnya yang membutuhkan transfuse darah.

Pelaksanaan inovasi terminal darah ini dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikut keterangan sumber pendanaan kolaboratif Terminal Darah Puskesmas adalah:

**Tabel 1**

**Sumber Dana Terminal Darah Puskesmas**

Sumber Dana	2017	2018
BOK	10.000.000	8.000.000
DAU	6.000.000	6.000.000
CSR	19.000.000	18.000.000
<b>Total</b>	<b>35.000.000</b>	<b>32.000.000</b>

Sumber: Naskah Terminal Darah Puskesmas

Tabel 1 di atas memberi gambaran bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengumpulan dana merupakan inovasi dalam upaya pemenuhan terminal dara puskesmas. Adanya kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat memberikan dampak terhadap ketersediaan darah bagi mereka yang butuh darah, terutama bagi ibu-ibu yang melahirkan.

### 3. Layanan Terintegrasi.

Hasil indikator layanan terintegrasi merupakan indikator jaminan ketersediaan peningkatan layanan publik yang cepat dan nyaman kepada warga masyarakat. Strategi layanan terintegrasi untuk peningkatan layanan merupakan indikator yang ketiga dengan nilai (17%) dalam menciptakan pemerintahan inovatif di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil analisis melalui Nvivo 12 plus menjelaskan bahwa pemerintah telah

mendorong jaminan ketersediaan peningkatan layanan publik yang cepat dan nyaman kepada warga masyarakat dalam membangun perubahan dan inovasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Pemerintah telah memberi jaminan pelayanan kepada masyarakat secara nyaman (tidak berbelit-belit) misalnya pelayanan kesehatan kepada ibu melahirkan, ada dokter dan mobil yang disiapkan untuk menjemput dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan tempatnya nyaman

Selanjutnya, hamper semua SKPD sudah terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pelayanan itu mudah dan praktis, bukan hanya dirasakan oleh masyarakat biasa, tetapi kita juga pegawai sangat merasakan kenyamanan itu. Misalnya pegawai mengurus kepangkatan tidak perlu lagi berkumpul di BKD, cukup diurus saja oleh satu orang pegawai yang ditugaskan karena berkas setiap pegawai sudah ada di BKD sejak menjadi CPNS. Tidak perlu lagi setiap mengurus minta lagi fotocopy berkas, tinggal dilengkapi saja yang belum ada. Jadi pegawai itu cukup menunggu saja di kantornya tanpa harus meninggalkan tugas-tugasnya”.<sup>1</sup>

Berikut hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Kepatutan Pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik pada tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia. Adapun jumlah kabupaten yang disurvei sebanyak 107 (Ombudsman, 2017). Hasil yang didapatkan adalah dari 107 kabupaten yang diteliti terdapat (44,86%) atau 48 pemerintah kabupaten masuk dalam zona merah dengan predikat kepatutan rendah. Sedangkan pemerintah kabupaten yang masuk pada zona kuning sebesar (42,99%) atau 46 kabupaten dengan predikat kepatutan sedang. Kemudian kabupaten yang masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatutan tinggi sebanyak 12,15% atau 13 pemerintah kabupaten. Adapun pemerintah kabupaten yang masuk dalam zona hijau dengan tingkat kepatutan tinggi terhadap pelayanan public sebanyak 13 kabupaten adalah:

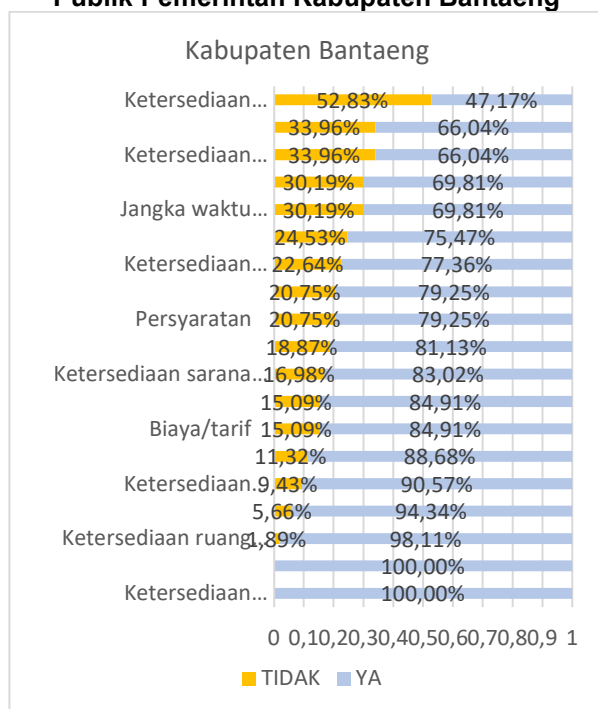
- a. Kabupaten Bangka (97,35)
- b. Kabupaten Belitung Timur (96,36)
- c. Kabupaten Bengkulu Utara (92,91)
- d. Kabupaten Muaro Jambi (92,47)
- e. Kabupaten Tanah Datar (90,67)
- f. Kabupaten Kutai Kartanegara (90,65)



- g. Kabupaten Siak (89,11)
- h. Kabupaten Garut (88,47)
- i. Kabupaten Polewali Mandar (87,86)
- j. Kabupaten Deli Serdang (85,63)
- k. Kabupaten Pinrang (81,67)
- l. Kabupaten Bantaeng (81,18)
- m. Kabupaten Pide (80,74)

Dari 13 pemerintah kabupaten yang masuk dalam zona tingkat kepatutan terhadap pelayanan public tinggi, Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 13 kabupaten yang dimaksud. Penilaian Kepatutan Pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap standar pelayanan publik dilakukan pada 10 unit layanan, yaitu: (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (2) Dinas Pariwisata, (3) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (6) Dinas Pertanian dan Peternakan, (7) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, (8) Dinas Pertanian dan Peternakan, (9) Dinas Sosial, dan (10) Badan Lingkungan Hidup Daerah/Bappedalda. Adapun hasil penilaian terhadap indicator pada 10 unit layanan pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

**Grafik 5.5**  
**Penilaian Indikator Kepatutan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bantaeng**



Sumber: Laporan Survey Ombudsman RI 2017

Memerhatikan grafik 5.5 di atas menjelaskan bahwa indicator kepatutan pelayanan public Kabupaten Bantaeng

dengan nilai 81,18 berada pada kategori tinggi berdasarkan kesimpulan Ombudsman tahun 2017.

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator pemanfaatan teknologi informasi merupakan indikator dalam mendorong tingkat efisiensi dan efektifitas melalui pemanfaatan teknologi digital. Strategi pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi merupakan indikator yang ke empat dengan nilai (14%) dalam menciptakan pemerintahan inovatif di Kabupaten Bantaeng. Pemanfaatan teknologi di Kabupaten Bantaeng, misalnya pada pelayanan kesehatan cukup menekan nomor 113 demikian pula dengan pemadam kebakaran, petugas akan datang dalam waktu yang tidak lama, artinya bisa menghemat waktu, tenaga, dan anggaran.

Selanjutnya dengan terkoneksi lembaga-lembaga dengan baik, walaupun masih ada juga yang belum sehingga memudahkan melakukan koordinasi antar lembaga. Dengan pemanfaatan teknologi digital sangat memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian senyaman apapun pelayanan tetap masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam penggunaan teknologi.

#### 5. Desentralisasi

Indikator desentralisasi merupakan indikator dalam mendorong pemberian layanan lebih dekat dengan masyarakat yang disertai dengan kepastian dan kepuasan masyarakat dan pelaku bisnis. Strategi mendekatkan layanan kepada masyarakat merupakan indikator yang ke lima dengan nilai (14%) dalam menciptakan pemerintahan inovatif di Kabupaten Bantaeng. Mendekatkan layanan kepada masyarakat, berdasarkan hasil analisis melalui Nvivo 12 plus mendapatkan nilai yang sama dengan strategi pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai (14%). Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kedua indikator ini saling mendukung dalam membangun perubahan dan inovasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bantaeng. Untuk memperkuat peran desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan daerah, lebih lanjut Toha (Huraerah, 2019:77), mengemukakan bahwa dalam pertemuan para pemerintahan dan akademisi dunia yang mencetuskan Deklarasi Seoul terkait dengan pemerintahan daerah

yang menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik bisa dicapai jika memenuhi tingkat desentralisasi, inovasi, dan otonomi pembangunan daerah yang tepat. Administrasi dan otonomi pemerintahan daerah bisa dicapai dan diwujudkan lebih efektif dengan melalui peningkatan desentralisasi, baik administrative, finansial, digitalisasi pemerintahan, dan kinerja manajemen yang berdasarkan hasil. Berdasarkan pendapat tersebut, jelas bahwa peran desentralisasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan inovatif sangat dibutuhkan untuk memberi kekutan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

#### D. KESIMPULAN

Percepatan pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang inovatif di Kabupaten Bantaeng dapat dilaksanakan secara dinamis karena mendapat dukungan yang tinggi dari masyarakat. Dukungan yang tinggi diperoleh dari masyarakat karena pemerintah mampu membangun kepercayaan atau trust melalui kerja nyata dan memberi bukti atas janji-janji politik seorang pemimpin.

Adapun strategi yang paling menonjol dalam membangun tata kelola pemerintahan daerah yang inovatif adalah pelibatan warga masyarakat kemudian diikuti oleh pemanfaatan kerjasama, layanan terintegrasi, pemanfaatan teknologi informasi, desentralisasi. Untuk mempercepat inovasi tata kelola pemerintahan temuan penelitian ini adalah pemimpin menerapkan model kolaboratif dalam setiap program dan tema kegiatan.

#### E. REFERENSI

##### Buku

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bandur, Agustinus. 2019. *Penelitian Kualitatif Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Basrowi dan Sudikin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi 3. Terjemahan: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi 3. Alih Bahasa: Ahmad Lintang L. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denhardt, Janet V. & Robert B. Denhardt. 2013. *Pelayanan Publik Baru: Dari Manajemen Steering ke Serving*. Penerjemah: Saut Pasaribu. Bantul: Kreasi Wacana.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Fahrudin, 2017. *Nurdin Abdullah Act Locally, Think Globally*. Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika.
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Dialihbahasakan: Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasim, Azhar. dkk. 2015. *Merekonstruksi Indonesia : Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Krcmar, H. (2013). *IT-Governance als Teil der organisationalen Governance*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-02161-0>
- Maxwell, Joseph A. 1996. *Kualitatif Research Design: An Interactive Approach Applied Social Research Methods Series; V.41*. Thousand Oaks Londong: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanusi, Anwar & Fadillah Putra. 2019. *Governansi Nusantara (Jejak Kosmopolitanisme dalam Sejarah*

*Kepemerintahan di Indonesia*). Depok: LP3ES.

Saparita, Rachmini, dkk. 2015. *Membangun Sistem Inovasi untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: LIPI

Sedarmayanti & Yaya Mulyana A. Azis. 2020. *Dinamika Governance di Era Revolusi Industri 4.0 (Dalam Teori dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan)*.

Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance (20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Suwaryo, Utang. 2017. *Azas-Azas Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Kapsipi

Syahrani, dan Syahrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.

#### **Artikel, Jurnal, dan Penelitian dari Sumber Elektronik**

Handayani, Wiwandari. dkk. 2013. *Kajian Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang*. Jurnal Riptek, Vol. 7, No. 2.

Putra, Donie Tua F. *Kapabilitas Dynamic Governance dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2017*. Jurnal: Kemudi (Jurnal Ilmu Pemerintahan), V.04, No. 02, Februari 2020, 144-176.

Recupero, Diego R, dkk. *An Innovative, open, cloud, interoperable citizen engagement platform for smart government and users' interaction*. <https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1605/1605.07343.pdf>, diakses, 08 Nov 2017

Sangkala. 2013. *Innovativ Government*. Yogyakarta : Capiya Publishing

Sirajuddin, S. Mirsa & A. Atrianingsi. 2020. *Kepercayaan Publik (Publik Trust)*

*Terhadap E-Government: Studi kasus Penggunaan E-Mobile BPJS Kesehatan di Kota Makassar*. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 80-88. <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.1.55-65.2020>

Syah, D., Cangara, H., & Sultan, I. (2015). *Opini dan sikap masyarakat terhadap pembaharuan dan kepemimpinan bupati nurdin abduallah dalam memajukan bantaeng sebagai kota industri dan wisata*. Jurnal Komunikasi KAREBA, 4(3), 300–314.

Tahir, Muchlas dan Ahmad Harakan. 2015. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Maksasar*. Bandung : Prosiding Fisip UNIKOM.

Tamimi, Zindar. 2015. *Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Tim Emergency Service Kabupaten Bantaeng*. Jurnal POLITIKA, Vol. 6, No. 1.

Vani, R. V. & M. (2020). *Kapabilitas Dynamic Governace Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Pemberlakuan New Normal di Masa Pandemi Covid 19*. Agregasi, 8(2), 145–167. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3894>

#### **Media Online**

<https://news.detik.com/berita/2903112/digani-ar-tokoh-perubahan-ini-prestasi-bupati-bantaeng-nurdin-abduallah>.

<https://news.detik.com/berita/d-3597468/icw-bantaeng-contoh-baik-bagi-daerah-lain-untuk-melawan-korupsi> (diakses, 13 Ferruari 2021)

<http://jipp.sulselprov.go.id/direktori/read/151> (diakses, 13 Februari 2021)

<https://www.ombudsman.go.id/produk/lihat/196/LP> (diakses, 14 Feb 2021)

<https://www.youtube.com/watch?v=0ecBbFZhs5A> (diakses, 15 Feb 2021) file:

Nurdin Abdullah\_Bantaeng gratis  
pelanan Kesehatan

<https://www.youtube.com/watch?v=OVkn4Uuaj0g> (diakses, 15 Feb 2021) file:  
video\_Nurdin Abdullah di Jepang

<https://www.youtube.com/watch?v=c2mYrQAqp4&t=21s> (diakses, 15 Feb 2021)  
file: 8 Tempat Wisata Bantaeng  
Terbaru

<https://www.youtube.com/watch?v=dtAwXYSb1JU&t=10s> (diakses, 15 Feb 2021)  
file: Profile Kabupaten Bantaeng

<https://www.youtube.com/watch?v=LpxmbqBtLaE&t=30s> (diakses, 15 Feb 2021)  
file: Hitam Putih – Bupati Inspiratif

#### **Dokumen/Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan  
Teknologi Republik Indonesia dan  
Menteri Dalam Negaei Republik  
Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 dan  
Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang  
Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi  
Daerah.

RPJMD Kabupaten Bantaeng 2013 - 2018